

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Seringkali pembangunan di wilayah yang lebih kecil mampu memberikan hasil yang mendukung pembangunan di wilayah yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih kecil, pembangunan dilakukan di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten atau kota.<sup>2</sup>

Untuk meningkatkan pembangunan di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten atau kota serta di tingkat nasional maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu.

Menurut Kuncoro, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang

---

<sup>2</sup>Indra Rukmana, "Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 1984-2009", *Economics Development Analysis Journal Vol. 1 No.1* tahun 2012, ISSN 2252-6560, hal. 27

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu membutuhkan sumber daya yang cukup besar.

Sumber daya tersebut meliputi, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya kelembagaan. Berbagai sumber daya ekonomi tersebut disediakan oleh alam secara alamiah agar dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat yang mengelola sumber daya ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang melimpah dapat meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi.<sup>4</sup> Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi, dan sebaliknya pula pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 27

<sup>4</sup>Christea Frisdiantara, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal.2-3

<sup>5</sup>Yulina Eliza, "Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat", *Pekbis Jurnal*, Vol.7, No.3, November 2015: 200-210, hal. 200

Indikator yang digunakan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui proses pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercermin kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk karena pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk. Jumlah penduduk perlu diperhatikan karena selain sebagai subjek, penduduk juga merupakan objek pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kependudukan akan mempengaruhi proses pembangunan serta tujuan yang hendak dicapai.<sup>6</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi di Indonesia secara spasial atau yang mempunyai kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar yakni dari pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pulau Jawa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Yang menjadikan pulau Jawa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yaitu karena pusat industri berasal dari pulau Jawa, banyak sekali kawasan-kawasan industri di pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau lainnya, hal ini dikarenakan industri-industri tersebut mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah kemudahan akses distribusi dan juga pusat pemerintahan.<sup>8</sup>

Dengan kemudahan akses distribusi, maka biaya transportasi dapat ditekan dan juga pusat pemerintahan mempermudah perusahaan untuk

---

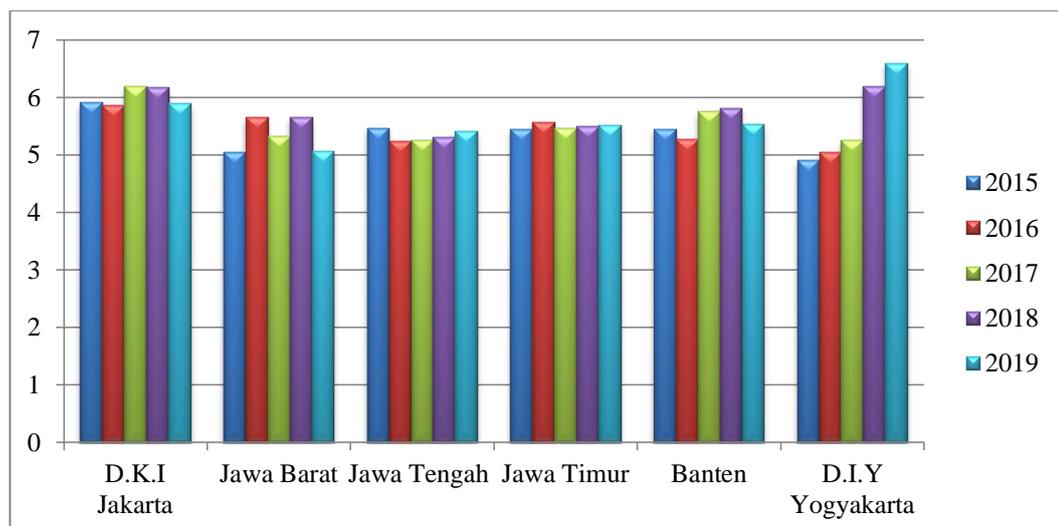
<sup>6</sup>Indra Rukmana, *Pengaruh Disparitas*.....hal. 27

<sup>7</sup>Perekonomian, dalam <https://investor.id/business/bps-pulau-jawa-alami-kontraksi-ekonomi-lebih-dalam>, Diakses pada 4 April 2021.

<sup>8</sup>BPS Pulau Jawa, dalam <https://brainly.co.id/tugas/12136875>, Diakses pada 4 April 2021.

memperoleh perizinan. Ditambah lagi tempat produksi akan selalu mendekati sumber bahan baku, oleh sebab itu pulau jawa menjadi tempat yang paling baik bagi industri-industri di Indonesia, mulai industri barang sampai dengan jasa keuangan. Dari banyaknya industri dan jasa keuangan yang ada akan berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup>

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yakni di Pulau Jawa yang mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS data diolah)

**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019**

Berdasarkan dari gambar 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi yang ada di pulau Jawa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015-2019. Bahwa laju

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, dalam <https://brainly.co.id/tugas/12136875>, Diakses pada 4 April 2021.

pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di DKI Jakarta yaitu sebesar 6,08%, disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,61%, diikuti oleh Banten 5,57%, kemudian Jawa Timur 5,50%, Jawa Barat 5,35% dan di posisi terakhir Jawa Tengah dengan rata-rata 5,34%.<sup>10</sup>Cepat atau lambatnya nilai pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yang dicapai oleh daerah lain. Karena suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat jika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat jika dari tahun ke tahun mengalami penurunan.<sup>11</sup>

Salah satu Provinsi di Indonesia bagian Pulau Jawa yaitu di Jawa Timur, yang berada di posisi ke empat dari laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami naik turun dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sebesar 5,44%, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,57%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,46%, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,50%, dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 5,52%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 5,52%, hal ini didukung oleh pertumbuhan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 7,58%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,55%, serta informasi dan komunikasi 7,36%. Sektor yang dominan dalam

---

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.htm>, diakses 5 Februari 2021.

<sup>11</sup>Ida Nuraini, "Kualitas Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur", Jurnal Feb Unikama, Mei 2017, hal 82

perekonomian Jawa Timur, yaitu industri pengolahan (29.73%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,19%), serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (11,90%). PDRB per kapita tahun 2019 Jawa Timur sebesar Rp. 59,26 juta, lebih tinggi dibandingkan nasional Rp. 59, 10 juta.<sup>12</sup>

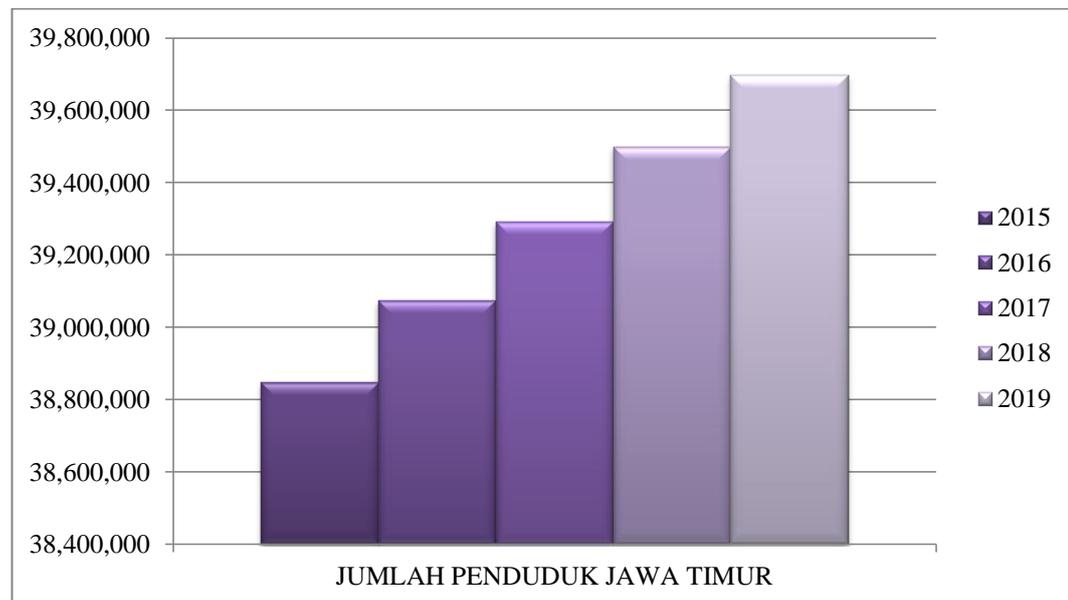
Menurut penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Christiawan Eka Arianto Dkk, bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah tiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk maka akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Kontrol akan peningkatan jumlah penduduk sangat perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk di Jawa Timur yang mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019:

---

<sup>12</sup> Provinsi Jawa Timur menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi bagi penduduk Indonesia bagian Timur, dalam <https://kompaspedia.kompa.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-timur>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

<sup>13</sup>Christiawan Eka Arianto, et all, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember”, *Jurnal ISEI Jember Volume 5 Nomor 1, April 2015*, hal 157.



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS data diolah)*

### **Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2015-2019**

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan angka jumlah penduduk di Jawa Timur yang terus-menerus meningkat dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 sebesar 38.847.561, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 39.075.152, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 39.698.631 penduduk. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk disebabkan karena tingkat kelahiran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019 rata-rata meningkat.

Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur terbesar kedua setelah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 39,69 juta jiwa pada tahun 2019. Kepadatan penduduk per kilometer persegi sebesar 831 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan rasio jenis kelamin adalah 97,53%. Laju pertumbuhan penduduk sepanjang 2010-2019 sebesar 0,64%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi

di Kabupaten Sidoarjo (1,63%) dan terendah di Kabupaten Lamongan (0,09%). Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur terbanyak berada di Kota Surabaya (2,896 juta jiwa), dan yang paling sedikit yaitu di Kota Mojokerto (129 ribu jiwa).<sup>14</sup>

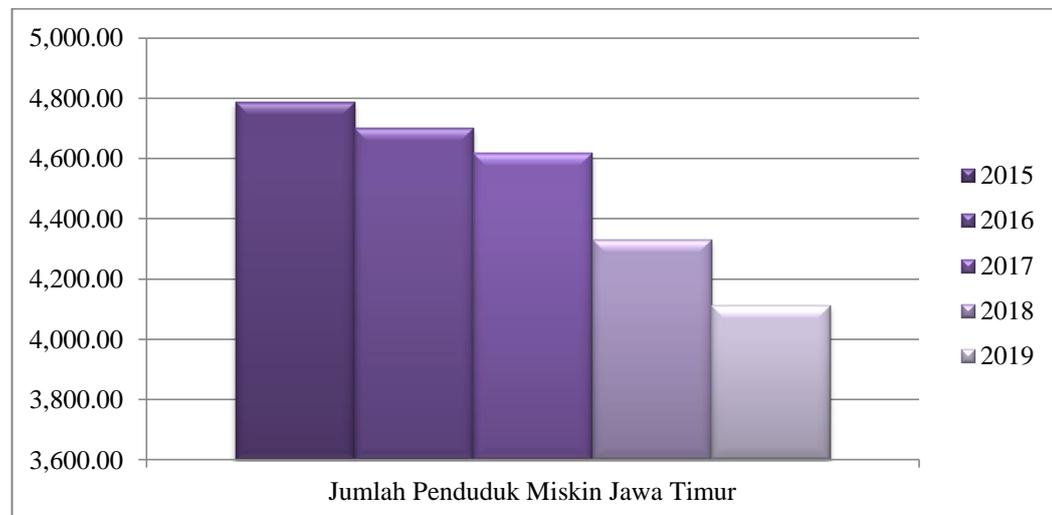
Menurut penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Sundari Rahma Sari Putri bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi yang baik maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampak pertambahan penduduk mengakibatkan tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang terus-menerus meningkat akan menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti tingkat kemiskinan.<sup>15</sup>

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur saat ini dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan berdasarkan jumlah penduduk miskin. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2015-2019:

---

<sup>14</sup> Provinsi Jawa, dalam <https://kompaspedia.kompa.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-timur>, .....diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

<sup>15</sup>Sundari Rahma Sari Putri, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018*” (Medan: UINSU, 2019), hal. 23



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS data diolah)

**Gambar 1.3** Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dilihat dari tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 4.789,12, selanjutnya tahun 2016 sebesar 4.703,30, pada tahun 2017 sebesar 4.617,01, tahun 2018 sebesar 4.332,59, dan di tahun 2019 sebesar 4.112,25.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada tahun 2018 sebesar 6,97% dan turun menjadi 6,84% pada tahun 2019. Secara umum, pada periode 2015-2019 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan turunnya persentase penduduk miskin selama periode 2015-2019 antara lain yaitu: terjadi inflasi umum sebesar 1,39%, beberapa komoditi makanan mengalami penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu komoditi cabai merah mengalami penurunan 4,59%, penurunan indeks juga terjadi pada komoditi daging sapi yaitu -

031%, tempe -1,69%, dan minyak goreng -0,80%, selanjutnya yaitu faktor indeks upah buruh tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 3,54%.<sup>16</sup>

Menurut teori yang dikemukakan oleh Rostow, bahwa jumlah penduduk miskin yang terus menurun tiap tahunnya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial sebagai instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>17</sup>

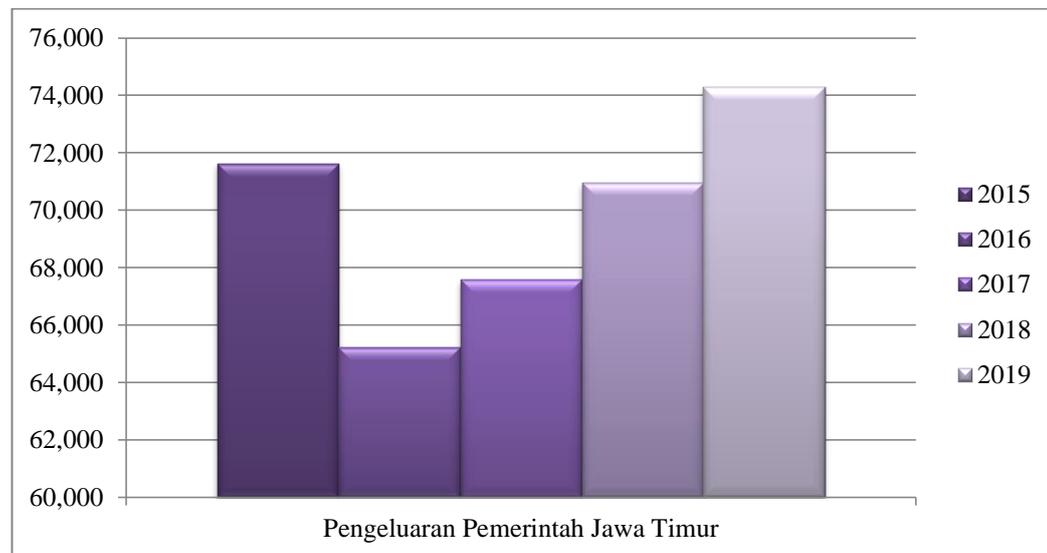
Menurut Sadono Sukirno pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.<sup>18</sup> Berikut adalah perkembangan pengeluaran pemerintah di Jawa Timur tahun 2015-2019:

---

<sup>16</sup> Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019*, (BPS: Jawa Timur, 2019) No. 45/07/35/Thn.XVII, hal. 1-3.

<sup>17</sup> Rahmah Amalia, dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat", *Jurnal Analisis Vol. 4 No. 2: 183-189*, hal. 184

<sup>18</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 38



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS data diolah)

**Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)  
Tahun 2015-2019**

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengeluaran pemerintah di Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan, dilihat dari tahun 2015 sebesar Rp. 71.636 miliar, selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 65.240 miliar, dan di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 74.238 miliar. Upaya penghematan belanja operasional yang dilakukan pemerintah pusat terus berlanjut sejak awal tahun 2016 untuk mengatasi potensi melemahnya penerimaan pajak. Perlambatan tersebut terindikasi yang didorong oleh realisasi APBN Jawa Timur yang cukup rendah dibandingkan 2015. Namun kondisi pengeluaran pemerintah kembali stabil dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menjadi Rp. 74.238 miliar. Besar kecilnya peranan pemerintah dalam sebuah perekonomian dapat dilihat

dari besar kecilnya proporsi pengeluaran pemerintah terhadap total kegiatan perekonomian atau pendapatan nasional.

Naik turunnya pengeluaran pemerintah tersebut, pemerintah harus dapat memainkan perannya dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber-sumber daya serta distribusi pendapatan diantara konsumen sehingga dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>19</sup>

Menurut penelitian terdahulu mengenai tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Hapsari Wiji Utami dkk bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu pemerintah harus mengatur sistem pemberian upah, karena upah atau yang biasa disebut dengan Upah Minimum Regional (UMR) merupakan sumber penghasilan, apabila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga mempengaruhi tingkat kemiskinan.<sup>20</sup>

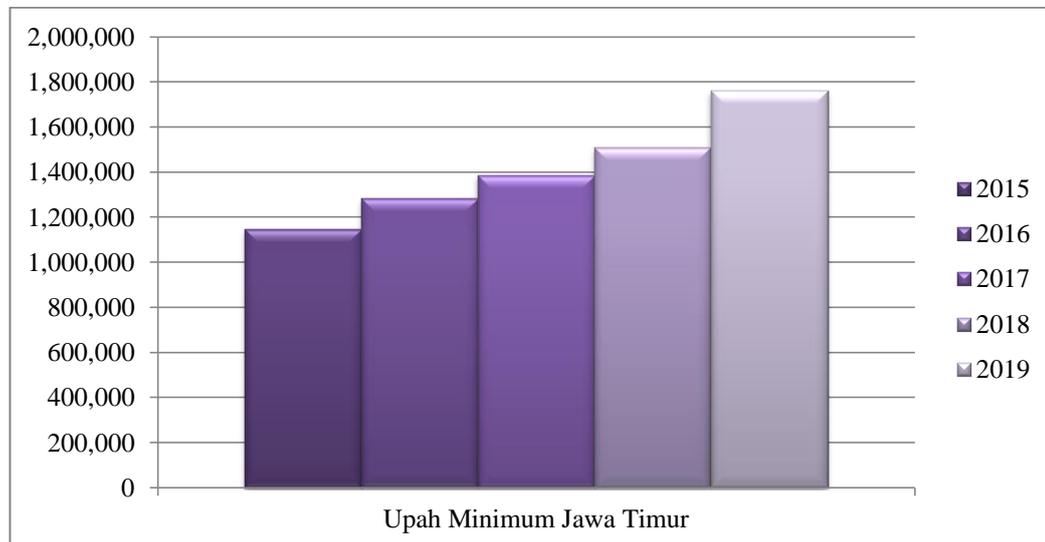
Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah yang ditetapkan secara bertahap agar setara dengan kebutuhan minimum. Menurut Bappeda Jawa Timur tahun 2010 upah minimum merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga

---

<sup>19</sup>Rahmah Amalia, et all, *Pengaruh Pengeluaran .....*hal. 188

<sup>20</sup>Hapsari Wiji Utami, et all, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, Vol. 28, No. 2 November 2018, hal. 110

kerja.<sup>21</sup> Berikut adalah perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Timur dari tahun 2015-2019:



Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur (data diolah)

### **Gambar 1.5 Upah Minimum Regional (UMR) Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019**

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.150.000, dan di tahun 2019 mencapai Rp. 1.763.267. UMR Jawa Timur menduduki posisi ke empat di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 1.763.267, dan tertinggi yaitu UMR DKI Jakarta sebesar Rp. 4.276.349, sedangkan terendah yaitu UMR DI Yogyakarta sebesar 1.070.543. Di Jawa Timur UMK tertinggi berasal dari Kota Surabaya sebesar Rp. 4.020.457, sedangkan UMK terendah yaitu berasal dari Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi,

<sup>21</sup>Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, “Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”, *Jurnal Ekonomi Vol. 22, No. 2 Juni 2014*, hal. 3

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 1.913.321.

Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam presentase dari total pengeluaran cenderung meningkat.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan judul ***“Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015-2019.
2. Upah minimum regional (UMR) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015-2019.
3. Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu pada tahun 2015-2019.

---

<sup>22</sup> Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1 April 2008, hal. 45

4. Kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu pada tahun 2015-2019.
5. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil pada tahun 2015-2019.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan begitu juga dengan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2015-2019 maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur tahun 2015-2019?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), Pengeluaran Pemerintah, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah untuk diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung guna untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur saat ini.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam bidang keilmuan guna untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi makro.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi peneliti memperoleh pengetahuan praktis terkait ilmu ekonomi makro mengenai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur.
- b. Bagi pemerintah di harapkan sebagai referensi dan bahan masukan untuk diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur saat ini.

- c. Bagi Akademisi diharapkan sebagai referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memperkenalkan variabel jumlah penduduk, upah minimum regional (UMR), pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil ruang lingkup wilayah Jawa Timur. Variabel data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder pada tahun 2015-2019 yang diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel data yang digunakan adalah :

- a. Variabel Bebas (*Variabel Independent*) adalah variabel yang memenuhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat (*Variabel Dependent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk (X1), upah minimum regional (X2), pengeluaran pemerintah (X3), dan kemiskinan (X4).
- b. Variabel Terikat (*Variabel Dependent*) adalah variabel yang dipengaruhi atau sebagai akibat adanya variabel bebas (*Variabel Independent*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y).

## 2. Keterbatasan Penelitian

Data panel atau yang disebut dengan gabungan antara data *cross section* dan data *time series* dengan rentang waktu dari tahun 2015-2019.

Karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk tiap variabelnya.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat.<sup>23</sup>
- b. Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.<sup>24</sup>
- c. Upah minimum regional (UMR) adalah upah terendah yang berlaku pada semua sektor usaha di daerah/provinsi.<sup>25</sup>
- d. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendaatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional

---

<sup>23</sup> Syamsul Arifin, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas Jawa Tengah : CV.Pena Persada, 2020), hal. 9.

<sup>24</sup> Kependudukan, dalam <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

<sup>25</sup> Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *Mimbar Kekaryaannya ABRI*, (Jakarta Timur : CVMYDA, 1993), hal 24.

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.<sup>26</sup>

- e. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.<sup>27</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

- a. Variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Jawa Timur 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Variabel Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah penduduk menurut Kab/Kota di Jawa Timur (ribu) 2015-2019. Sumber data yang diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Variabel upah minimum regional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur / Jatimprov.go.id
- d. Variabel pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diukur dengan jumlah pengeluaran pemerintah menurut

---

<sup>26</sup>Teori pengeuaran, dalam <https://www.abstraksiekonomi.com/2013/11/teori-pengeluaran-pemerintah.html?m=1>, diakses pada tanggal 31 januari 2021.

<sup>27</sup>Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida dan Warsilan, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, (1), 2016 ISSN print: 0216-7786, ISSN online: 2528-1097.

kabupaten/kota di Jawa Timur 2015-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

- e. Variabel kemiskinan yang digunakan dalam penelitian yaitu diukur dengan jumlah penduduk miskin menurut Kab/Kota di Jawa Timur 2015-2019. Sumber data diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik (BPS).

## **H. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang suatu penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional dan susunan penulisan skripsi.

### **2. BAB II Landasan Teori**

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang membahas variabel atau sub variabel pertama, variabel atau sub variabel kedua dan seterusnya. Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **3. BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data penelitian, serta teknis analisis data.

#### 4. BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian berupa diskripsi data masing-masing variabel dan pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

#### 5. BAB V Pembahasan

Pada bab ini mamaparkan pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

#### 6. VI Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN